

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2020



Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol
© 2020

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2020 dengan tema Perumusan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah, yang diselenggarakan dalam bentuk Daring.

Tujuan Forum ini adalah guna membahas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet terkait Perumusan Strategis Komunikasi Krisis Pemerintah.

FKP hadir oleh para Pemangku Kepentingan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol; media massa; ahli/praktisi yakni Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden; Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden; penyelenggara layanan; dan pengguna layanan.

Laporan Pelaksanaan FKP yang diselenggarakan dalam bentuk webinar ini disusun untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan evaluasi pelayanan publik pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jakarta, Oktober 2020

Asisten Deputi Bidang Hubungan
Masyarakat dan Protokol,



Said Muhidin

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3
2.1. Analisis Masalah.....	3
2.2. Pelaksanaan	11
2.2.1. Pra Pelaksanaan.....	11
2.2.2. Pelaksanaan	13
2.2.3. Pasca Pelaksanaan	16
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Humas pemerintah baik di lembaga kepresidenan, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menyampaikan visi dan kerja pemerintah kepada 267 juta rakyat Indonesia. Tugas penting tersebut mendapatkan tantangan dengan masuknya dunia kehumasan ke dalam fase baru yang ditandai dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi.

Proses publik dalam mencari informasi terkait kebijakan pemerintah terganggu oleh adanya misinformasi dan disinformasi oleh media massa maupun media sosial. Oleh karena itu, perlu langkah yang komprehensif dari pemerintah agar publik bisa mendapatkan informasi yang valid dan otoritatif secara maksimal.

Dimensi pertama konsep komunikasi sistematis membutuhkan pendalaman terhadap aspek nalar kebijakan, yaitu alasan dan kepentingan dari satu kebijakan lahir. Selain itu adalah aspek konsekuensi kebijakan, yaitu kemungkinan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Konsekuensi kebijakan sendiri memiliki dua bentuk, baik konsekuensi konstruktif (*intended consequences*) dan konsekuensi tidak terduga yang tidak baik (*unintended consequences*).

Narasi Indonesia Maju adalah gagasan besar dari Presiden Joko Widodo sebagai visi dari arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Narasi ini perlu diterjemahkan dalam kaidah komunikasi yang efektif sehingga semangat untuk membangun bangsa tidak hanya datang dari pemerintah namun juga datang dari seluruh masyarakat Indonesia, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan partisipasi aktif yang konstruktif dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Demikian halnya dengan upaya untuk keluar dari persoalan pandemi Covid-19. Dibutuhkan gotong royong *pentahelix* antara pemerintah, media, perguruan tinggi, dunia bisnis, dan masyarakat. Semua elemen tersebut

diharapkan bisa berkontribusi sesuai bidang masing-masing untuk memutus mata rantai sebaran Covid-19 di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Sekretariat Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema Silaturahmi Humas Kementerian/Lembaga dalam rangka Merumuskan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah dengan Humas Kementerian, Lembaga dan BUMN dalam rangka menyamakan perspektif terkait komunikasi krisis pemerintah, yang diikuti oleh pejabat dan pegawai Humas Kementerian, Lembaga dan BUMN pada tanggal 1 Oktober 2020 secara daring.

Hasil pelaksanaan kegiatan FKP tersebut dituangkan dalam laporan yang tersaji berikut ini.

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

- a. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet; dan
- d. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud terselenggaranya kegiatan FKP ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

Sedangkan tujuan adalah dalam rangka merumuskan strategi komunikasi krisis pemerintah guna mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Analisis Masalah.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2020 dengan tema Perumusan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah telah menghasilkan 2 (dua) rekomendasi penting untuk peningkatan layanan kehumasan pemerintah, yaitu:

- 1) Memastikan bahwa pentingnya informasi disampaikan kepada masyarakat, yang intinya agar program dan kebijakan Pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyejahterakan masyarakat rakyat terlebih masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Perlu lebih berani dalam melaksanakan komunikasi 2 arah karena jika masih 1 arah, masyarakat menjadi kurang antusias dan Humas Pemerintah kurang mendapat *trust* masyarakat.

Dari kedua rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol merumuskannya menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*).

Kekuatan Asdep Humas dan Protokol berkaitan erat dengan potensi strategis Asdep Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Kekuatan yang pertama adalah, Peran dan Kedudukan Strategis Asdep Humas dan Protokol. Asdep Humas dan Protokol memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis khususnya dalam melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet. Selama kurun waktu tahun 2015-2019, Asdep Humas dan Protokol telah

melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna dilakukan diseminasi informasi yang akurat dan berimbang terkait program dan kebijakan pemerintah baik melalui website Sekretariat Kabinet maupun melalui media sosial yang dikelola Sekretariat Kabinet.

Kekuatan yang kedua adalah, Komitmen Pimpinan yang Tinggi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Humas dan Protokol didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, serta terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berkelanjutan.

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Humas dan Protokol tergambar dalam keterlibatan aktif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan, penyempurnaan, maupun peningkatan 8 (delapan) area perubahan, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan tersebut yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan program reformasi birokrasi (*quick win*).

Dalam peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan, Asdep Humas dan Protokol juga melakukan pengembangan dan pemutakhiran sistem dan inovasi secara berkelanjutan seperti penyempurnaan pewajahan *website* Sekretariat Kabinet menjadi "milenial dan berwibawa". Hal tersebut untuk menghasilkan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet.

2. Kelemahan (*Weaknesses*).

Di samping kekuatan-kekuatan yang menjadikan Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja yang Berwibawa, Andal, dan Terdepan dalam Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Kehumasan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas, Asdep Humas dan Protokol juga perlu

mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada untuk segera melakukan pembenahan. **Kelemahan-kelemahan** tersebut yaitu:

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi.

Upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan Protokol telah turut membantu dalam membangun dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi guna mendukung kelancaran dalam pelayanannya. Sistem informasi yang telah dibangun dan dikembangkan yakni pewajahan *website* www.setkab.go.id menjadi “milennial dan berwibawa”.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* tetapi masih dirasakan bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi tersebut dirasakan belum optimal. Dalam hal ini para pemangku kepentingan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai sebuah kebutuhan. Selain itu, juga perlu mendorong seluruh pegawai di lingkungan Asdep Humas dan Protokol untuk memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah dibangun, dikembangkan, dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol dalam manajemen kabinet Sekretariat Kabinet harus didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja harus dilakukan agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan manajemen kabinet

Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Asdep Humas dan Protokol harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol.

c. Dukungan Sarana dan Prasarana Belum Sesuai dengan Kebutuhan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mutlak dibutuhkan. Sarana dan prasarana memiliki arti sebagai seperangkat alat yang bisa digunakan untuk mendukung keberlangsungan suatu kegiatan. Seperangkat alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan ini dapat mempermudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari suatu penyelenggaraan kegiatan. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dapat juga ditentukan karena adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan juga prasarana tidak hanya meliputi barang atau benda saja tetapi juga dapat meliputi tempat atau bahkan ruangan yang bisa mendukung kelancaran kegiatan.

d. Belum Optimalnya Pengenalan Tugas dan Fungsi Organisasi.

Salah satu tugas Sekretariat Kabinet *c.q* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah menyelenggarakan forum pengambilan kebijakan dalam bentuk sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun demikian, peran dan eksistensi dalam menjalankan tugas tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet *c.q* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tersebut belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal. Hal tersebut disebabkan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi belum terkomunikasikan dan dipahami oleh Kementerian/Lembaga serta masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman strategis tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam forum pengambilan kebijakan maka diperlukan strategi komunikasi untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga terbentuk citra dan reputasi yang baik dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, peran digital *Public Relation* (PR) dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan peran strategis dari Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Digital PR dapat dilakukan melalui media digital dan media sosial sebagai saluran yang kuat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, pengembangan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, kerja sama, maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan terbangunnya *image* organisasi, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dapat menjadi lebih dikenal, optimal, dan berwibawa.

3. **Peluang** (*Opportunities*).

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan **peluang-peluang** yang memungkinkan Asdep Humas dan Protokol untuk berkembang. Peluang tersebut antara lain *Website* Sekretariat Kabinet sebagai Rujukan Media Informasi Nasional. Secara rutin *website* Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) yang dikelola oleh Asdep Humas dan Protokol senantiasa mempublikasikan berita atau artikel yang memuat program dan kebijakan pemerintah, baik yang berasal dari hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden maupun yang berasal dari Kementerian/Lembaga. *Website* Sekretariat Kabinet, sebagai media yang digunakan Sekretariat Kabinet menyediakan dan menyampaikan data dan informasi, diantaranya terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, baik kegiatan penyelenggaraan sidang

kabinet, rapat, maupun kegiatan pertemuan lainnya yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, dan menyampaikan data dan informasi kegiatan kabinet. Selama ini *website* Sekretariat Kabinet telah menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga, masyarakat, dan media/jurnalis nasional untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat.

Peluang lainnya adalah Kerja Sama dengan Mitra Kerja. Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan Protokol berperan secara aktif dan memiliki peluang untuk dapat berkolaborasi ataupun kerja sama dengan mitra kerja baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga lainnya. Peluang membuka jaringan kerja sama tersebut sangat dimungkinkan mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang bersifat internal di lingkungan Asdep Humas dan Protokol. Dengan demikian, melalui berbagai kerja sama dengan mitra diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengalami kelambanan, rumit, dan berbelit-belit dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.

4. Ancaman (*Threats*).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disamping banyaknya peluang-peluang yang tercipta, Asdep Humas dan Protokol juga memiliki **ancaman** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul yaitu:

a. Sasaran terhadap Isu Negatif dan Berita Hoaks.

Salah satu dampak dari era internet yaitu menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan data dan informasi. Namun, dampak lain dari internet juga membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoaks*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan kebencian, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kritik dan *hoaks* menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya Asdep Humas dan Protokol yang mengelola *website* dan

media sosial Sekretariat Kabinet, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Untuk menjawab isu sensitif dan meng-*counter* hoaks, Asdep Humas dan Protokol melakukan berbagai upaya dengan segera mengklarifikasi berita bohong (hoaks) atau dengan kata lain informasi harus dilawan dengan informasi. Asdep Humas dan Protokol bekerja sama dengan Juru Bicara Presiden, Staf Khusus Presiden, dan melalui kanal media sosial yang dimiliki secara aktif melawan dan meredam ancaman penyebaran hoaks dengan menjawab dan meluruskan isu negatif yang menyudutkan pemerintah yaitu dengan membumikan dan menyosialisasikan keberhasilan program dan kebijakan pemerintah secara masif.

b. Peretasan Jaringan *Website* Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja Sekretariat Kabinet yang mengelola *website* maupun media sosial resmi Sekretariat Kabinet, di mana selama ini telah menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga, masyarakat, dan media/jurnalis nasional untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat.

Ancaman *cyber attacks* (serangan siber) terhadap jaringan *website* Sekretariat Kabinet menjadi tantangan besar bagi Asdep Humas dan Protokol dalam menyelenggarakan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet. Terlebih lagi keseluruhan aktivitas dalam penyelenggaraan tersebut terdapat data dan informasi serta dokumen yang sifatnya rahasia dan belum saatnya dipublikasikan karena masih mempertimbangkan seluruh kepentingan yang apabila dapat diakses publik yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan keresahan publik. Ancaman serangan siber melalui virus/*malware* (program jahat) yang dapat mencuri/menghapus data di server dan kemungkinan terjadi kesalahan sistem sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, harus diantisipasi sehingga tidak terjadi percobaan untuk membobol *website* Sekretariat Kabinet.

Langkah antisipasi yang diambil Asdep Humas dan Protokol adalah melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang

kompeten dan memiliki otoritas di bidang teknologi informasi dan pengamanan data yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Belum Optimalnya Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan visi dan misi tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan Protokol semata, melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi pemangku kepentingan. Keberhasilan, peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan Protokol dalam keseluruhan aktivitas tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama Asdep Humas dan Protokol dengan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet yang dilakukan Asdep Humas dan Protokol, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait yang apabila masih kurang mendukung, kurang optimal dalam bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang diamanatkan dan masih bertindak ego sektoral, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, terlebih lagi dalam memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, harus dilakukan penguatan kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di antara pemangku kepentingan dalam menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis serta adanya masalah kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antarkementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, maupun masalah ego sektor dan tumpang tindih. Menyikapi hal tersebut, agar tidak menjadi ancaman maka Asdep Humas dan Protokol secara berkala dan terus-menerus melakukan kerja sama maupun rapat koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Harapannya adalah agar dengan kerja sama yang intensif dapat memberikan dukungan pelayanan prima kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.2. Pelaksanaan.

2.2.1. Pra Pelaksanaan.

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, diawali dengan membentuk Tim/Panitia Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2020, yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

b. Tema Forum Konsultasi Publik.

Tema Forum Konsultasi Publik adalah Perumusan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah.

c. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik.

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan pemangku kepentingan untuk membahas Perumusan Strategi Komunikasi Pemerintah.

d. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah non tatap muka atau Daring secara *virtual* melalui *Zoom Meeting*.

e. Pihak yang Terlibat.

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik antara lain:

1. Media massa.
2. Ahli/Praktisi yaitu Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden dan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden.

3. Penyelenggara layanan yaitu Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. Pengguna layanan dan *Stakeholder* yaitu Humas Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan BUMN.

f. **Jadual Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (*Run Down Acara*).**

No.	Waktu	Acara
1.	13.30 – 13.35	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2.	13.35 – 13.40	Pembukaan Acara oleh MC
3.	13.40 – 13.50	Laporan Kegiatan oleh Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol
4.	13.50 – 14.05	Sambutan sekaligus Pembukaan Acara oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
5.	14.05 – 15.15	Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik terkait Perumusan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah
6.	15.15 – 16.00	Dialog terkait Pelayanan Publik untuk Merumuskan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah
7.	16.00 – 16.10	Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2020 oleh Asdep Humas dan Protokol Setkab
9.	16.10 – 16.25	Foto Bersama (<i>Screen Shot</i>)
10.	16.25 – 16.30	Penutupan Acara oleh MC

2.2.2. Pelaksanaan.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 secara Daring di Jakarta.

b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik.

- 1) Membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah. Terkait SMCR yang linier dan sederhana seperti salah satu komponennya adalah Sumber. Sebagaimana kita ketahui bahwa kredibilitas Sumber sangat berpengaruh terhadap efektivitas pesan dalam komunikasi.
- 2) Yang harus segera dilakukan peningkatan literasi media sehingga ada *awareness* dari semua pihak untuk bermain di media sosial atau media lainnya.
- 3) Memanfaatkan potensi karyawan di lintas seluruh kementerian/lembaga sebagai *digital army* untuk memviralkan sebuah isu. Hal tersebut sudah dilakukan secara internal tapi tentu harus lebih masif lagi apabila lintas kementerian/Lembaga sehingga tinggal diatur mekanismenya saja. Terkait hal tersebut sudah benar dan biarkan saja menjadi organik, namun harus dihitung Bersama-sama apa *hashtag*-nya, apa narasinya, dilempar melalui kluster mana, dan sebagainya. Jadi, kuantitasi dikawinkan dengan kualitas (dihitung). Terhadap hal tersebut, *Science* sudah dapat untuk digunakan 'membaca' dinamika tersebut.
- 4) Kita tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu, mari sinergikan Bersama (bukan menjadikan satu) dan buat beragam.
- 5) Agar seluruh Pejabat Pratama Kepala Biro Humas K/L dapat diwadahi oleh KSP dengan fasilitasi Kementerian Kominfo. Hal ini dapat membantu sinergitas.
- 6) Perlu dicermati, apa kira-kira strategi yang harus dilakukan apabila kendalanya justru dari internal mengingat tidak semua pucuk pimpinan menyadari hal tersebut dan mengingat juga sebagian dari pimpinan

pucuk berada pada generasi yang tidak masuk dalam konteks *millennial* sehingga dukungan terhadap humas tidak optimal.

- 7) Dunia maya (*online/daring*), dan dunia nyata (*offline/luring*) ibarat dua sisi mata uang, keduanya harus dilakukan. Ketika ada pemahaman yang berbeda maka memang ada 'tugas khusus' untuk semua agar dapat 'menyadarkan' situasi kekinian. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus masuk dan memahami dunia *digital*, kalau perlu bisa dilakukan semisal pelatihan untuk 'membaca dunia maya'.
- 8) Saat ini, AI (*Artificial Intelligence*) dan ML (*Machine Learning*) sudah dapat dikembangkan untuk membaca dinamika data besar di dunia maya. Apa yang bisa diserahkan ke mesin, serahkan saja (kapasitas otak terbatas untuk berhitung) ke mesin. Hal ini agar bisa konsentrasi ke hal-hal yang lebih strategis dan substansi.
- 9) *Fear, Faith, Female and Food* yang akan selalu dipakai untuk mengaktifkan *amygdala* (mudah menerima *hoax, fakenews*), salah satunya dengan *Fun* ('direcehkan'). Agar kita tidak reaktif dalam merespons *fakenews* atau berita negatif yang beredar tapi produktif berbagi kabar baik tentang kinerja pemerintah. Ibarat pelawak itu cerdas dan jenius, sulit melawak tetapi berisi. Jadi, 'direcehkan' tapi cerdas.
- 10) Komponen yang jadi *pivotal* adalah *hardware, software, dan BRAINware*. Terkait hal ini, KemristekBRIN dapat menjadi pemimpin mengembangkan algoritma. Kita dapat memakai *opensource* dan mencetak data-data *scientist*. Terkait hal ini, KemenristekBRIN mempunyai Tim Komunikasi yang terdiri dari para pemuda (*gank XYZ*). Namun, jarang dapat *negative news*, tapi berisi *thanks to Covid-19*. Oleh karena itu, KemristekBRIN dan LPNK-nya menjadi semakin produktif menghasilkan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-19. KemenristekBRIN sat ini juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian BUMN, dan lain-lain.
- 11) Agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin, berkala, dan berkesinambungan sehingga Humas Pemerintah dapat lebih tajam

memetakan strategi yang tepat. Namun, terkadang perlu pencerahan dan solusi konkrit dari persoalan-persoalan yang dihadapi dengan narasi tunggal yang terus berjalan.

- 12) Ide untuk mencetak data *scientist* handal saat ini tengah ditunggu sehingga komunikasi publik dan pemerintah semakin dapat menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi membangun Indonesia.
- 13) Saat ini mudah dikembangkan kemampuan membaca atau menarik percakapan di *Twitter* atau media sosial online lainnya dan menganalisisnya dengan *network analysis*. Jadi, dapat diketahui akun mana yang mesti di-*mention* dan narasinya apa, dan sebagainya. Hal tersebut sudah dapat dilakukan dengan beberapa program *opensource*.
- 14) Kolaborasi lintas K/L, BUMN, BUMD, PTN bukan hal yang baru atau tabu. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Humas Pemerintah dilibatkan aktif untuk mengglorifikasi kerja pemerintah dan kebijakan pemerintah melalui adanya forum-forum kehumasan seperti SIMAN, Bakohumas, Satgas Medsos, dan lain-lain. *Output* dari kegiatan kehumasan ini sangat beragam dan yang saat itu viral adanya narasi tunggal yang berisi program kerja atau kebijakan strategis pemerintah baik yang dilakukan oleh satu K/L atau kerja sama lintas K/L. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini skema seperti narasi tunggal dapat dihidupkan Kembali, sehingga humas pemerintah mengetahui program-program strategis pemerintah secara keseluruhan dan tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan atau berjuang sendiri untuk mendiseminasikannya.
- 15) Hal-hal yang positif perlu dilanjutkan sebagai bentuk kolaborasi K/L dan *Grand Strategy* kehumasan juga perlu didesiminasikan kepada Humas K/L sebagai acuan kehumasan K/L ke depan.
- 16) Masukan dan semangat yang diimpartasi membuat Humas Pemerintahan menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja.

- 17) Forum ini sangat bermanfaat dan menjadi penyemangat tim Humas K/L dan BUMN untuk berkolaborasi mendukung program-program pemerintah.

2.2.3. Pasca Pelaksanaan.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, diakhiri dengan membuat janji perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

BAB III

PENUTUP

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Tahun 2020, telah menghasilkan 2 (dua) rekomendasi penting sebagai janji perbaikan atas layanan kehumasan pemerintah yang dibuat antara Unit Layanan bersama-sama dengan Humas Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan (Humas Kementerian/Lembaga) akan memastikan bahwa pentingnya informasi disampaikan kepada masyarakat, yang intinya agar program dan kebijakan Pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyejahterakan masyarakat rakyat terlebih masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan (Humas Kementerian/Lembaga) perlu lebih berani dalam melaksanakan komunikasi 2 arah kerana jika masih 1 arah masyarakat menjadi kurang antusias dan Humas Pemerintah kurang mendapat *trust* masyarakat.

LAMPIRAN

Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini, tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Kabinet telah mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan Para Pihak Terkait guna membahas permasalahan di bidang pelayanan publik guna Merumuskan Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah yang dilakukan secara daring, dengan hasil Unit Layanan bersama-sama dengan Humas Kementerian/Lembaga, berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan dalam hal:

1. Memastikan bahwa pentingnya informasi disampaikan kepada masyarakat, yang intinya agar program dan kebijakan Pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menyejahterakan masyarakat rakyat terlebih masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, juga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu lebih berani dalam melaksanakan komunikasi 2 arah karena jika masih 1 arah, masyarakat menjadi kurang antusias dan Humas Pemerintah kurang mendapat *trust* masyarakat.

Jakarta, 1 Oktober 2020
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan
dan Protokol,

Said Muhidin, S.H., M.H.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

Notulensi.

**NOTULENSI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DALAM RANGKA PERUMUSAN STRATEGI
KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAHAN
JAKARTA, 1 OKTOBER 2020**

1. Poin-poin Paparan Materi Narasumber M. Fadjroel Rachman, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden RI:
 - a. Judul Paparan adalah Strategi Komunikasi Mengelola Kepercayaan Terhadap Presiden RI dan Pemerintah di Era Digital.
 - b. **Indonesia Maju** merupakan *Nation Branding* yang terus menerus disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Strategi untuk mencapai *Nation Branding* tersebut adalah dengan adanya *The Governing President*. Dari *The Governing President* kemudian akan muncul *The Governing Government*. Strategi tersebut diturunkan dari visi Presiden.
 - c. Kerangka Kerja Model Komunikasi Berbasis Nilai untuk Indonesia Maju yang digunakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi adalah Sumber Pesan, Pesan (Perspektif atas kebijakan, program, ide, gagasan), Medium (Platform Media Sosial, Media Massa, Komunitas dan Jaringan). Dari ketiga komponen tersebut, yang ingin dicapai adalah perubahan struktur mental dari 267 juta rakyat Indonesia sekaligus perubahan struktur sosial yang memperlihatkan bahwa ada *governing president* dan *governing government*. Apabila terdapat perubahan pada struktur mental dan struktur sosial ini maka akan tumbuh adanya Persepsi Positif (optimis, konstruktif, partisipatif, kolaboratif, akomodatif, inovatif) yang berujung pada *Trust*, kepercayaan terhadap Presiden maupun Pemerintah. Tugas Kementerian/Lembaga/BUMN adalah *managing persepsi/trust* baik kepada Presiden maupun pemerintah. Tentu juga akan ada feedback nya.
 - d. Penanganan opini publik yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Tim adalah lebih banyak ke area *connecting* dan *supporting* dengan Kementerian, Lembaga dan BUMN.
 - e. Hendaknya kita memakai metode Pentahelix atau kolaborasi (sesuai juga dengan arahan Presiden) misalnya dalam penanganan kasus Covid-19 ini. Pemerintah bekerjasama dengan akademisi, komunitas, dunia usaha dan media. Kolaborasi menjadi penentu dalam kita mengelola persepsi terhadap Presiden maupun Pemerintah.
 - f. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Tim sedang mengerjakan pengukuran kuantitatif tentang tingkat kepercayaan terhadap Presiden maupun Pemerintah yang disebut *Presidential/Government Trust Perception Index* yang rencananya akan digunakan mulai tahun depan dan diukur setiap enam bulan untuk memperlihatkan bagaimana pengeolaan persepsi baik terhadap pemerintah maupun Presiden, yang sementara ini sifatnya lepas karena diukur oleh Lembaga Survei di luaran. Tujuan utama *Presidential/Government Trust Perception Index* adalah membuat analisis terhadap persepsi dan rekomendasi kebijakan komunikasi yang berbasis data dan riset.
 - g. Kesimpulannya adalah menjaga NKRI, menjaga persepsi dan kepercayaan (*trust*) kepada Presiden RI dan Pemerintah itu bisa dilakukan melalui strategi komunikasi yang baik, efektif dan efisien di era digital.

2. Poin-poin Paparan Materi Narasumber Irendra Radjawali, Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden RI:

- a. Judul Paparan adalah Tantangan Mis/Dis-Informasi dalam Komunikasi di Era Digital.
- b. Saat ini kita hidup saat ini di era industry 4.0, era big data dan algoritma. Masyarakat Indonesia jika dipetakan berdasarkan demografi online, rata-rata dalam sehari mengakses internet selama 8 jam, 64% masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet aktif. Media sosial yang paling banyak diakses adalah YouTube, Whatsapp dan Facebook. Yang menarik adalah, 99% konten yang diakses masyarakat Indonesia adalah menonton video online dan 79% menonton vlog.
- c. Tantangan untuk kita semua sekarang adalah bagaimana membuat pesan positif yang viral dan menular. Menurut Henry Jenkins (2006) sesuatu bisa menjadi viral kalau hal tersebut bisa membawakan suatu ide tertentu ke kepala yang tepat pada waktu yang tepat (*viral sharing can be defined as "getting the right idea into the right heads at the right time*). Sedangkan menurut Gustafsson (2010), apa isi pesan dari ide yang mudah viral, adalah gambar, konsisten dengan pandangan dunia saat ini dan pandangan audiens (*the features needed for any media content to be truly viral are evocative images and consistency with existing world views in the minds of the audience*). Selain itu, masih ada kesalahan dalam mengukur viralitas dengan *rending topic*, padahal metode tersebut kurang tepat.
- d. Data saat ini belum jadi informasi, informasi belum jadi pengetahuan, pengetahuan belum jadi pemahaman dan pemahaman belum jadi kebijaksanaan. Mari kita semua saat ini tidak sekedar *showing the data* menjadi *story telling with data then story telling the knowledge, insight and wisdom*.

3. Poin-poin Masukan dari Peserta Humas Kementerian/Lembaga dan BUMN:

- a. Membangun kepercayaan publik bukan hal yang mudah. Terkait SMCR yang linier dan sederhana seperti salah satu komponennya adalah Sumber. Sebagaimana kita ketahui bahwa kredibilitas Sumber sangat berpengaruh terhadap efektivitas pesan dalam komunikasi. Terkait hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah:
 - 1) Bagaimanakah strategi komunikasi yang digunakan apabila kredibilitas Sumber terganggu oleh kredibilitas para pembantu Sumber atau pihak-pihak yang ada dalam lingkaran Sumber itu sendiri?
 - 2) Bagaimanakah menjaga agar apa yang disampaikan Juru Bicara mempunyai makna sama atau satu kata?
 - 3) Gambar/foto adalah simbol yang bermakna, lalu bagaimana mengatasi foto atau visual yang tidak mencerminkan makna yang diharapkan?
- b. Yang harus segera dilakukan peningkatan literasi media sehingga ada *awareness* dari semua pihak untuk bermain di media sosial atau media lainnya.
- c. Memanfaatkan potensi karyawan di lintas seluruh kementerian/lembaga sebagai *digital army* untuk memviralkan sebuah isu. Hal tersebut sudah dilakukan secara internal tapi tentu harus lebih masif lagi apabila lintas

kementrian/Lembaga sehingga tinggal diatur mekanismenya saja. Terkait hal tersebut sudah benar dan biarkan saja menjadi organik namun harus dihitung Bersama-sama apa *hashtag*-nya, apa narasinya, dilempar melalui kluster mana, dan sebagainya. Jadi, kuantitasi dikawinkan dengan kualitas (dihitung). Terhadap hal tersebut, *Science* sudah dapat untuk digunakan 'membaca' dinamika tersebut.

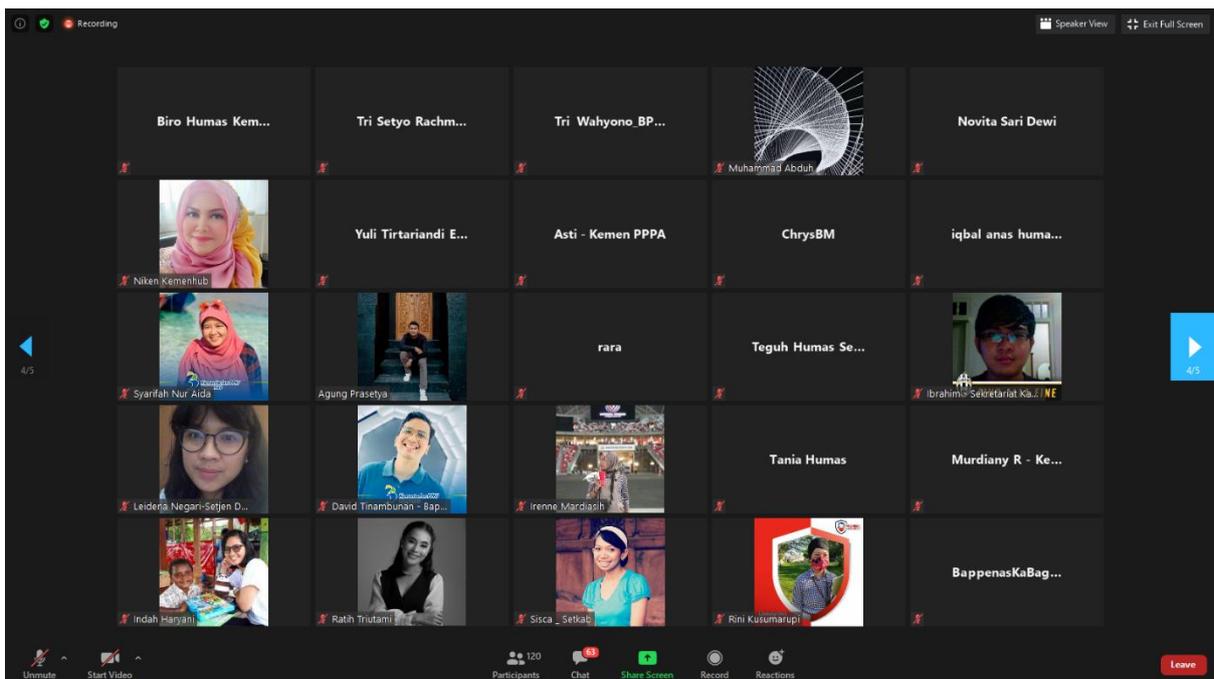
- d. Kita tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu, mari sinergikan Bersama (bukan menjadikan satu) dan buat beragam.
- e. Agar seluruh Pejabat Pratama Kepala Biro Humas K/L dapat diwadahi oleh KSP dengan fasilitasi Kementerian Kominfo. Hal ini dapat membantu sinergitas.
- f. Perlu dicermati, apa kira-kira strategi yang harus dilakukan apabila kendalanya justru dari internal mengingat tidak semua pucuk pimpinan menyadari hal tersebut dan mengingat juga sebagian dari pimpinan pucuk berada pada generasi yang tidak masuk dalam konteks *millennial* sehingga dukungan terhadap humas tidak optimal.
- g. Dunia maya (*online/daring*), dan dunia nyata (*offline/luring*) ibarat dua sisi mata uang, keduanya harus dilakukan. Ketika ada pemahaman yang berbeda maka memang ada 'tugas khusus' untuk semua agar dapat 'menyadarkan' situasi kekinian. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus masuk dan memahami dunia *digital*, kalau perlu bisa dilakukan semisal pelatihan untuk 'membaca dunia maya'.
- h. Saat ini, AI (*Artificial Intelligence*) dan ML (*Machine Learning*) sudah dapat dikembangkan untuk membaca dinamika data besar di dunia maya. Apa yang bisa diserahkan ke mesin, serahkan saja (kapasitas otak terbatas untuk berhitung) ke mesin. Hal ini agar bisa konsentrasi ke hal-hal yang lebih strategis dan substansi.
- i. *Fear, Faith, Female and Food* yang akan selalu dipakai untuk mengaktifkan *amygdala* (mudah menerima *hoax, fakenews*), salah satunya dengan *Fun* ('direcehkan'). Agar kita tidak reaktif dalam merespons *fakenews* atau berita negatif yang beredar tapi produktif berbagi kabar baik tentang kinerja pemerintah. Ibarat pelawak itu cerdas dan jenius, sulit melawak tetapi berisi. Jadi, 'direcehkan' tapi cerdas.
- j. Komponen yang jadi *pivotal* adalah *hardware, software, dan BRAINware*. Terkait hal ini, KemristekBRIN dapat menjadi memimpin mengembangkan algoritma. Kita dapat memakai *opensource* dan mencetak data-data *scientist*. Terkait hal ini, KemenristekBRIN mempunyai Tim Komunikasi yang terdiri dari para pemuda (*gank XYZ*). Namun, jarang dapat *negative news*, tapi berisi *thanks to Covid-19*. Oleh karena itu, KemenristekBRIN dan LPNK-nya menjadi semakin produktif menghasilkan riset dan inovasi untuk penanggulangan Covid-19. KemenristekBRIN sat ini juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian BUMN, dan lain-lain.
- k. Agar kegiatan silaturahmi ini dapat dilaksanakan secara rutin, berkala, dan berkesinambungan sehingga Humas Pemerintah dapat lebih tajam memetakan strategi yang tepat. Namun, terkadang perlu pencerahan dan solusi konkrit dari persoalan-persoalan yang dihadapi dengan narasi tunggal yang terus berjalan dan tentu diinisiasi oleh KSP.

- l. Ide untuk mencetak data *scientist* handal saat ini tengah ditunggu sehingga komunikasi publik dan pemerintah semakin dapat menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi membangun Indonesia.
- m. Saat ini mudah dikembangkan kemampuan membaca atau menarik percakapan di *Twitter* atau media sosial online lainnya dan menganalisisnya dengan *network analysis*. Jadi, dapat diketahui akun mana yang mesti di-*mention* dan narasinya apa, dan sebagainya. Hal tersebut sudah dapat dilakukan dengan beberapa program *opensource*.
- n. Kolaborasi lintas K/L, BUMN, BUMD, PTN bukan hal yang baru atau tabu. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Humas Pemerintah dilibatkan aktif untuk mengglorifikasi kerja pemerintah dan kebijakan pemerintah melalui adanya forum-forum kehumasan seperti SIMAN, Bakohumas, Satgas Medsos, dan lain-lain. *Output* dari kegiatan kehumasan ini sangat beragam dan yang saat itu viral adanya narasi tunggal yang berisi program kerja atau kebijakan strategis pemerintah baik yang dilakukan oleh satu K/L atau kerja sama lintas K/L. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini skema seperti narasi tunggal dapat dihidupkan Kembali, sehingga humas pemerintah mengetahui program-program strategis pemerintah secara keseluruhan dan tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan atau berjuang sendiri untuk mendiseminasikannya.
- o. Hal-hal yang positif perlu dilanjutkan sebagai bentuk kolaborasi K/L dan *Grand Strategy* kehumasan juga perlu didiseminasikan kepada Humas K/L sebagai acuan kehumasan K/L ke depan.
- p. Masukan dan semangat yang diimpertasi membuat Humas Pemerintahan menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja.
- q. Forum silaturahmi ini sangat bermanfaat dan menjadi penyemangat tim Humas K/L dan BUMN untuk berkolaborasi mendukung program-program pemerintah.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Foto Kegiatan.





Daftar Hadir.

ABSENSI PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DALAM RANGKA PERUMUSAN STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH, 1 OKTOBER 2020

No.	Nama Depan	Nama Belakang	Kementerian/Lembaga	Email
1	M. Fadjiroel	Rachman	Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi (Narasumber)	mfadjiroelrachman@gmail.com
2	Irendra	Radjawali	Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi (Narasumber)	radjawali@gmail.com
3	Andi	Zulkarnain	Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi (Moderator)	marlaputri567@gmail.com
4	Yuyu	Mulyani	Sekretariat Kabinet	yuyu.mulyani@setkab.go.id
5	R. Efa	Febryana	Kementerian Sekretariat Negara	efa.febryana@gmail.com
6	Ferdinandus	Setu	Kominfo	ferd007@kominfo.go.id
7	Dewi	Fibriana	PT Sucofindo (Persero)	dewif@sucofindo.co.id
8	Edy	Martha	Setkab	em@setkab.go.id
9	Chrystianto	Budi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak	chrys@kemenpppa.go.id
10	Rusnadi	Suyatman Putra	BNPB	rusnadisuyatman@gmail.com
11	Muhammad	Absar Salim	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	absarsalim@gmail.com
12	sugeng	santoso	Karohumas Lemhannas RI	panji232santoso@gmail.com
13	Suprajaka	BIG	Badan Informasi Geospasial	suprajaka@big.go.id
14	Mufti	Ihsan	Sekretariat Kabinet	muftihsan13@gmail.com
15	solechah	lechah	Komnas HAM	solechahangga@gmail.com
16	Ningsih	Mardia	Staff Humas BNPT	ningsihmardia@gmail.com
17	NUNU	ANUGRAH	KLHK	nunuanugrah30@gmail.com
18	WIWIT	WIDIANSYAH	KEMENTERIAN SOSIAL	widiansyah029@gmail.com
19	Taufik	RIGO	Bappenas	trigodiplomat@gmail.com
20	Esrom	Hamonangan Panjaitan	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	rujak123@hotmail.com
21	Ika	Permata Sari Silalahi	Kementerian Luar Negeri RI	ika.silalahi@kemlu.go.id
22	Fery	Gunawan	Kementerian Keuangan	ferygunawan@kemenkeu.go.id
23	Irenne	Mardiasih	Sekretariat Kabinet	irennemardiasih@setkab.go.id
24	Tania	Cut	BKPM	altania.cv@bkpm.go.id
25	Parulian	Silalahi	Kementerian PPN/Bappenas	parulian.silalahi@bappenas.go.id
26	Thanon	Aria	Sekretariat Kabinet	tdewangga@setkab.go.id
27	Nada	Marsudi	Kementerian RISTEK/BRIN	nmarsudi@gmail.com
28	Tri Setyo	Rachmanto	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	trisetyo.rachmanto@gmail.com
29	Akhmad Taufan	Maulana	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	taufan_bmkg@yahoo.com
30	R. Adha	Pamekas	Komisi Yudisial RI	raden.pamekas@komisiyudisial.go.id

No.	Nama Depan	Nama Belakang	Kementerian/Lembaga	Email
31	Muktiani Asrie	Suryaningrum	BKKBN	muktiani.asrie@gmail.com
32	kurniawatisari	nia	Kementerian Pertanian	kurniawatisari26@gmail.com
33	Dhimas Prabu	Anggoro	Kementerian ATR/BPN	dhimasprabuu@gmail.com
34	Asfiranti	Asfiranti	Kementerian Perdagangan	asfiranti@kemendag.go.id
35	Ria	Efriani	Kemenko Perekonomian	ria.epratiwi@gmail.com
36	Rizki	Ariesa	Kementerian Perhubungan	rizkiariesa@yahoo.com
37	Catur Iman	Pratigny	BPKP	pratigny65@gmail.com
38	Yusuf Fajar	Ramadhan	Kementerian Perhubungan	yusuffajarr@gmail.com
39	Yuli Tirtariandi	El Anshori	Universitas Terbuka	yulitirta@ecampus.ut.ac.id
40	Poppy	Sukmawati	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	poppy.sukmawati@waskita.co.id
41	Fallanti	Simbolon	Kemenko Perekonomian RI	faliantisimbolon@gmail.com
42	Fallanti	Simbolon	Kemenko Perekonomian RI	faliantisimbolon@gmail.com
43	Tri	Wahyono	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	yoenoe@gmail.com
44	Rina	Indriyana	Kementerian Perdagangan	indriyana.rina@gmail.com
45	Astari ratna Wardani	Astari	Kementerian Perindustrian	astariratna03@gmail.com
46	Taufan	Maulana	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	taufan.bmkg@gmail.com
47	Ubaidillah	Syohih	KLHK	ubai.milis@gmail.com
48	Taufiq	Kurniawan	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	opik1278@gmail.com
49	Inri	Denna	Kementerian Kesehatan RI	inri.denna@kemkes.go.id
50	Novita	Sari Dewi	Bakamla RI	novitasaridewi@icloud.com
51	Ruth	Samarla	Biro Humas Kementerian Perdagangan	ruth.turnip3@gmail.com
52	Giyatno	S.Sos	Kemenko Polhukam	Deputi7.polhukam@gmail.com
53	Ahmad	Ramadhan	Divisi Humas Polri	penumhumaspolri@gmail.com
54	Darmansyah	Darmansyah	Direktur Hubungan Masyarakat OTORITAS JASA KEUANGAN	darmansyah@ojk.go.id
55	Dono	Sembodo	BNN RI	donosem96@gmail.com
56	Taufan	Maulana	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	arumatmanagari@gmail.com
57	Hari	Setiyono	Kejaksaan Agung RI	sunproglaptau.puspenkum@gmail.com
58	Andreas	Patria	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	andreas@maritim.go.id
59	ERNA	AGUSTINA	SETJEN DPR RI	erna.agustina@dpr.go.id
60	Bangbang	Surono	BNPT	b.surono@yahoo.com

No.	Nama Depan	Nama Belakang	Kementerian/Lembaga	Email
61	Khairul Hidayati	-	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	hidamaritim@gmail.com
62	Edo	Sumarendra	Kementerian Perindustrian	edosumarendra@gmail.com
63	Syarifah Nur	Aida	Kementerian PPN/Bappenas	syarifah.aida@support.bappenas.go.id
64	Yohana	Putri	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	yohanalusitas@gmail.com
65	Danang	Ariwibowo Ichwan	Kemenko PMK	denmasdanang@outlook.com
66	Eddy	Cahyono Sugiharto	Kementerian Sekretariat Negara	efa.febr yana@gmail.com
67	cut nabella husaini	agustina	kemenko kemaritiman dan investasi	cutnabellaha@gmail.com
68	Ubaidillah	Tidak Ada	Kementerian Agama RI	ubaidillahmarsan@gmail.com
69	Dr	Kisworowati	BPJS Kesehatan	kisworowati@bpjs-kesehatan.go.id
70	Mohammad	Iqbal anas ma'ruf	BPJS KESEHATAN	iqbal.anas@bpjs-kesehatan.go.id
71	Ryan	Abdullah putra	BPJS Kesehatan	ryan.abdullah@bpjs-kesehatan.go.id
72	David	Tinambunan	Kementerian PPN/Bappenas	david.tinambunan@bappenas.go.id
73	Triksaningtiyas	Gayatri	Lembaga Administrasi Negara	trixie.junanto@gmail.com
74	Yayan	Rubaeni	Kemempora	yayan.gow@gmail.com
75	Irvansyah Utoh	Banja	BPJS Ketenagakerjaan	irvan.utoh@bpjsketenagakerjaan.go.id
76	Parulian	Silalahi	Kementerian PPN/ Bappenas	parulian.silalahi@bappenas.go.id
77	Brigjen TNI I. E. Djoko	Purwanto, S.E., M.M.	Kementerian Pertahanan	j.purwanto89@yahoo.co.id
78	Purwadi	-	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	purwadi.lipi@gmail.com
79	Desri	Andi	Biro Humas Setjen Kemhan	desriandi36a86@gmail.com
80	Sri	Sediyangsih	Universitas Terbuka	dianb@ecampus.ut.ac.id
81	Amelita	Lusia	Universitas Indonesia	amelitalusia@yahoo.com
82	Muktiani Asrie	Suryaningrum	BKKBN	muktiani.asrie@gmail.com
83	Rudy	Ibrahim	Badan Intelijen Negara	baronsuraji@gmail.com
84	Januarli	Marino	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan	marinosib70@gmail.com
85	Wiwit	Widiansyah	Kemensos	wiwit.widiansyah@kemensos.go.id
86	PARYONO, SH, MAP	PARYONO, SH, MAP	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	paryono@bkn.go.id
87	Fatahillah	M.Si	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	fatah.rais@gmail.com
88	Murdiany	Riniartha	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	artha@kemenpppa.go.id
89	Festy Rahma	Hidayati	Komisi Yudisial	festy@komisiyudisial.go.id
90	Benedicta	Anjaniasti	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	anjaniasti@gmail.com
No.	Nama Depan	Nama Belakang	Kementerian/Lembaga	Email
91	Suharti	Suharti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	suhartinasroen27@gmail.com
92	Ika	Permata Sari	Kementerian Luar Negeri	ika.silalahi@kemlu.go.id
93	Mukti	Herlambang	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	muktiher29@gmail.com
94	Rizkita	Widya Murwani	Kementerian Luar Negeri	rizkita.murwani@kemlu.go.id
95	Untung	Mahagunadi	Komisi Yudisial	untung@komisiyudisial.go.id
96	R. Adha	Pamekas	Komisi Yudisial	raden.pamekas@komisiyudisial.go.id
97	Alamsyah	Alamsyah	Lembaga Administrasi Negara	alamsyah.sandihardjo@gmail.com
98	Suprajaka	BIG	Badan Informasi Geospasial	suprajaka@big.go.id
99	Rahayu	Puspasari	Kementerian Keuangan	ses.birokli@gmail.com
100	Pracoyo Cipto	Nugroho	Lembaga Administrasi Negara	pracoyo.cn@gmail.com
101	rusnadi	suyatman	bnpb	rusnadisuyatman@gmail.com
102	Rita	Rosita S	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	rosita.sim@gmail.com
103	Kesturi	Haryunani	Badan Informasi Geospasial	ninok.kesturi@gmail.cok
104	Mone Iye Cornelia	Marschiavelli	Badan Informasi Geospasial	mone.iye@big.go.id
105	Tommy	Nautico	Badan Informasi Geospasial	tommynautico@gmail.com
106	Listiana	Operananta	Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	listiana.operananta@kemlu.go.id
107	Muhammad	Absar Salim	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	absarsalim@gmail.com
108	Giyanto	Awan	Badan Siber dan Sandi Negara	giyanto.awan.sularso@bssn.go.id
109	Anang	Ristanto	Pendidikan dan Kebudayaan	ristanto.anang@kemdikbud.go.id
110	Aditya	Wahyu Dewanggajati	Badan Pemeriksa Keuangan RI	aditya.dewanggajati@bpk.go.id
111	Siti	Nurayu Pardede	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	siti.pardede@bpk.go.id
112	Rizkynta	Ginting	Komisi Aparatur Sipil Negara	rizkynta.jaya@kasn.go.id
113	Dadan	Nugraha	Kemenristek/BRIN	dadannugraha74@gmail.com
114	Galuh	Pamungkas	Kemenristek/BRIN	pamungkaass@gmail.com
115	Nada	Darmiyanti Sriwijaningrum	Kemenristek/BRIN	nmarsudi@gmail.com
116	Kuntoro	Boga Andri	Kementerian Pertanian	kuntoro@pertanian.go.id
117	Yulia Jaya	Nirmawati, S.E., S.H., M.M.	Kementerian ATR/BPN	birohomas15@gmail.com
118	Solechah	Lechah	Komnas HAM	solechahrangga@gmail.com
119	Esrom Hamonangan Panjaitan	Esrom	Komnas HAM	esrom@komnasham.go.id
120	Dwie Irmawaty	Gultom	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	lipirma@gmail.com
No.	Nama Depan	Nama Belakang	Kementerian/Lembaga	Email
121	Dyah Rachmawati	Sugiyanto	LIPI	dyah.humas@gmail.com
122	Mila	Kencana	LIPI	ka.bkhh@mail.lipi.go.id
123	Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.	Sugeng	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI)	panji232santoso@gmail.com
124	Akhmad	Zulfikri	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	akhmadzulfikri@gmail.com
125	Tri	Wahyudi	Badan Siber dan Sandi Negara	tri.wahyudi@bssn.go.id
126	Budi	Santoso	Badan Siber dan Sandi Negara	b.santoso@bssn.go.id
127	Leidena	Negari	Setjen DPR RI	leidena.negari@dpr.go.id

Tim Kerja Forum Konsultasi Publik.

